

## Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas SDM, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo

Rizkiyah Lestari Utami<sup>1</sup> Yudi<sup>2</sup> & Misni Erwati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jambi, rizkiyahlestari19@gmail.com.

<sup>2</sup>Universitas Jambi, yudi\_Fe@unja.ac.id.

<sup>3</sup>Universitas Jambi, misniaja31@gmail.com.

### Abstract

*This study aims to see the effect of implementing government accounting standards, the quality of human resources, internal control systems on the quality of local government financial reports. This type of research includes causal associative research (cause and effect). The population in this study is the OPD in Bungo Regency, namely a total of 23 OPD consisting of the Office, Agency, Regional Secretariat and District. The number of respondents each consisted of one PPK person and one expenditure treasurer, with a total of 46 respondents. The sample in this study used a saturated sampling technique. The type of data used is primary data. The analysis was performed using a multiple regression model. The results of this study indicate that the application of government accounting standards and internal control systems has a significant positive effect on the quality of local government financial reports (sig 0.000). The quality of human resources has no effect on the quality of local government financial reports.*

*Keywords: accounting standard, human resources, internal control system, quality*

### PENDAHULUAN

Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi (1) pencatatan, (2) penggolongan, (3) peringkasan, (4) pelaporan, (5) penganalisisan data keuangan dari suatu entitas. Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu (Al Haryono, 2011).

Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang logis mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu objek pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyalurkan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang - Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020. BPK telah memeriksa LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada ringkasan neraca terdapat perbandingan asset dan ekuitas pada tahun 2020 dengan tahun 2019 yang menunjukkan adanya penurunan pada Kabupaten Bungo dimana aset mengalami penurunan sebesar -2,73 % dan ekuitas mengalami penurunan sebesar -4,15%. Pemeriksaan di tunjukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Bungo dengan Memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan. Berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (IHPD, 2020).

Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan opini atas LKPD Bungo masih WDP pada tahun 2021 yang lalu di akibatkan oleh beberapa hal antara lain, Pertama Penganggaran DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH SDA Perikanan, dan Dana Penyesuaian Khusus Daerah tidak sesuai dengan alokasi yang di tetapkan Pemerintah Pusat. Khususnya untuk penetapan target Dana Penyesuaian Khusus Daerah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ditetapkan sebagai transfer daerah oleh pemerintah pusat. Kedua, Tidak tersedianya kas yang mencukupi untuk membiayai belanja daerah mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya untuk membayar belanja tidsk sesuai peruntukannya. Ketiga, Terdapat kewajiban jangka pendek yang merupakan akumulasi Utang TA 2019 dan 2020 yang belum terbayar karena ketidakcukupan dana di kas daerah sehingga akan mengganggu pembebanan keuangan daerah Bungo di TA 2021. (sumber: [www.jambi.bkp.go.id](http://www.jambi.bkp.go.id)).

Berdasarkan opini BPK yang dapat dilihat dari *website* BPK Jambi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo TA 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bungo. Walaupun sudah meraih Opini WTP, Namun BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem

pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menyusun laporan keuangan, antara lain:

1. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp15.980.384.415,00;
2. Kas di bendahara pengeluaran dipindah bukukan ke rekening pribadi bendaharapada delapan SKPD sebesar Rp489.928.158,00;
3. Pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD H. Hanafie tidak sesuai ketentuan.

**Tabel 1. Opini Audit Kabupaten Bungo  
Periode 2016-2022**

Tahun	Jenis Opini
2016	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar dengan Pengecualian (WDP)
2021	Wajar tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: IHPS II 2022

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Bungo masih memiliki kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan.

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Penelitian berkaitan dengan kualitas laporan keuangan di lakukan oleh Gumelar, Agum (2017), Hendri, Meisy dan Erinos, NR (2020), Triwardana (2017), Apriansyah dkk., (2020), Sari, Nilam (2016), Andriani, Shylvia (2016), Julyana (2021), Faishol, (2016), Kiranayanti & Erawati (2016), dan Latifah (2017).

Standar akuntansi pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP berperan sangat penting untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan SAP dibelakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Penelitian yang berkaitan tentang SAP yang telah dilakukan oleh Gumelar, Agum (2017) menyatakan bahwa Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian lain yang mendukung yaitu Hendri, Meisy dan Erinos NR (2020) menyatakan bahwa Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD

Provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwardana (2017) Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Namun, Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Aprsiansyah dkk. (2020) dan Sari, Nilam (2016) menyatakan bahwa Penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi (1) pencatatan, (2) penggolongan, (3) peringkasan, (4) pelaporan, (5) penganalisisan data keuangan dari suatu entitas. Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu (Al Haryono, 2011).

Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar SAP dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah). Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2020

- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2021
- *Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2019)*.
- *Government Accounting Standards Republic of Indonesia (handbook 2020)*.

### **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia menurut Rucky (2003) adalah Tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat di tunjukan oleh sumber daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang diinginkan. Menurut Emilda (2014) dalam (Hendri, Meisy dan Erinos NR, 2020) mengatakan bahwa SDM merupakan kunci atau patokan dari keberhasilan sebuah sesuatu perusahaan, suatu perusahaan memiliki nilai yang baik disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008 dalam Dhonal dkk., 2018).

### **Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Dhonal dkk., 2018).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri, Meisy dan Erinos NR (2020) yang meneliti tentang Kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menyatakan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Sumatera Barat. Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Gumelar, Agum (2017) menyatakan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Penelitian Apriansyah dkk., (2020) juga menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo. Namun, Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani, Shylvia (2016) yang menyimpulkan bahwa Kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Merangin. Diikuti oleh penelitian yang dilakukan oleh Julyana (2021) menyatakan bahwa Kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan definisi Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI bertujuan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan negara. Penelitian yang terkait SPI menurut penelitian yang dilakukan oleh Faishol (2016) menyatakan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian lain yang mendukung yaitu Kiranayanti dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Nilam (2016) menyatakan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Namun, Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Gumelar, Agum (2017) menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2017) menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian. Adanya ketidakkonsistenan tersebut membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian variabel kualitas laporan keuangan, terkhusus kepada laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu, waktu dan lokasi penelitian yang berbeda, terdapat adanya Opini BPK yang menyatakan bahwa tahun 2020 Kabupaten Bungo menjadi WDP dan juga ingin mengetahui lebih lanjut masalah pengaruh SAP yang ada di Kabupaten Bungo.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kausal (hubungan sebab akibat). Sugiyono (2018) menyatakan bahwa asosiatif kausal adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau

lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu OPD di Kabupaten Bungo yang berjumlah 40 OPD terdiri dari Dinas, Badan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) atau Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. Penetapan populasi ini ditentukan karena Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa PPK OPD mempunyai tugas melakukan Penataan Keuangan OPD dan menyiapkan laporan keuangan sebatas unit kerjanya masing-masing sedangkan Bendahara Pengeluaran yang terdapat dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel menurut Sugiyono (2018).

**Tabel 3. Populasi dan Sampel OPD Pemerintah Kabupaten Bungo**

No.	Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	Jumlah OPD
1.	Badan Pemerintah Daerah	5
2.	Dinas Daerah	18
	Jumlah	23

Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berupa pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi berdasarkan pendapatnya masing-masing.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, maka perlu dilakukan pengujian terhadap kuesioner agar tidak bias. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Sedangkan pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara yaitu One Slot atau pengukuran sekali saja yang merupakan pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ).

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan uji

simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t). Perhitungan angka menggunakan skala likert untuk setiap pertanyaan dari setiap variabel dengan diberi skor 1-4. Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara dua variabel atau lebih atau menganalisa pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) secara bersamaan (Ghozali, 2018).

Kriteria pengujian hipotesis dalam penggunaan statistik F adalah ketika nilai signifikansi  $F < 0,05$ , maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Sedangkan Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antarvariabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengujian ini ditetapkan berdasarkan probabilitas. Apabila tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5 persen, dengan kata lain jika probabilitas  $H_a > 0,05$  maka dinyatakan tidak signifikan, dan jika probabilitas  $H_a < 0,05$  maka dinyatakan signifikan (Ghozali, 2018).

Koefisien determinasi (adjusted  $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol sampai satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai adjusted  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Data

#### a. Uji Validitas

Berdasarkan output SPSS yang telah dilakukan pengujian validitas seluruh item pernyataan yang diajukan pada kuesioner telah valid. Secara ringkas, hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Terhadap Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator	Perbandingan Nilai Signifikansi			
	Sig	Tingkat Sig	Keterangan	Validitas
X1.1	0,000	0,05	Sig .<0,05	Valid
X1.2	0,000		Sig .<0,05	Valid
X1.3	0,000		Sig .<0,05	Valid
X1.4	0,000		Sig .<0,05	Valid
X1.5	0,000		Sig .<0,05	Valid
X1.6	0,000		Sig .<0,05	Valid
X1.7	0,002		Sig .<0,05	Valid
X1.8	0,000		Sig .<0,05	Valid
X1.9	0,000		Sig .<0,05	Valid

X1.10	0,000	Sig .<0,05	Valid
X1.11	0,000	Sig .<0,05	Valid
X1.12	0,000	Sig .<0,05	Valid
X1.13	0,000	Sig .<0,05	Valid
X1.14	0,000	Sig .<0,05	Valid

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS*

Berdasarkan tabel 6 dapat di ketahui bahwa nilai signifikan pada variable X1 lebih kecil dari pada tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga nilai item dalam pertanyaan adalah valid karena nilai indikator penerapan standar akuntansi pemerintahan  $0.000 < 0,05$ . Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah empat belas item pertanyaan di dalam penelitian ini valid atau telah mampu mengukur apa yang seharusnya di ukur, yakni variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Tabel 7. Uji Validitas Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikato r	Perbandingan Nilai Signifikansi			
	Sig	Tingkat Sig	Keterangan	Validitas
X2.1	0,000	0,05	Sig .<0,05	Valid
X2.2	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.3	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.4	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.5	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.6	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.7	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.8	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.9	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.10	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.11	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.12	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.13	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.14	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.15	0,000		Sig .<0,05	Valid

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS*

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat di ketahui bahwa nilai signifikan pada variable X2 lebih kecil dari pada tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga nilai item dalam pernyataan adalah valid karena nilai indikator kualitas sumber daya manusia  $0.000 < 0,05$ . Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah lima belas item pertanyaan di dalam penelitian ini valid atau telah

mampu mengukur apa yang seharusnya di ukur, yakni variabel kualitas sumber daya manusia.

Tabel 8. Uji Validitas Indikator Sistem Pengendalian Intern

Indikator	Perbandingan Nilai Signifikansi			
	Sig	Tingkat Sig	Keterangan	Validitas
X2.1	0,021	0,05	Sig .<0,05	Valid
X2.2	0,009		Sig .<0,05	Valid
X2.3	0,013		Sig .<0,05	Valid
X2.4	0,012		Sig .<0,05	Valid
X2.5	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.6	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.7	0,000		Sig .<0,05	Valid
X2.8	0,000		Sig .<0,05	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 8 dapat di ketahui bahwa nilai signifikan pada variable X3 lebih kecil dari pada tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga nilai sitem dalam pertanyaan adalah valid karena nilai indikator Sistem Pengendalian Intern  $0.000 < 0,05$ . Dengan kata lain, instrument penelitian yang berjumlah delapan item pertanyaan di dalam penelitian ini valid atau telah mampu mengukur apa yang seharusnya di ukur, yakni variabel sistem pengendalian intren.

Tabel 9. Uji Validitas Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator	Perbandingan Nilai Signifikansi			
	Sig	Tingkat Sig	Keterangan	Validitas
Y1	0,000	0,05	Sig .<0,05	Valid
Y2	0,000		Sig .<0,05	Valid
Y3	0,000		Sig .<0,05	Valid
Y4	0,000		Sig .<0,05	Valid
Y5	0,000		Sig .<0,05	Valid
Y6	0,000		Sig .<0,05	Valid
Y7	0,000		Sig .<0,05	Valid
Y8	0,000		Sig .<0,05	Valid
Y9	0,000		Sig .<0,05	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat di ketahui bahwa nilai signifikan pada variable Y. lebih kecil dari pada tingkat signifikan sebesar 0,05 sehingga nilai sitem dalam pertanyaan adalah valid karena nilai indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  $0.000 < 0,05$ . Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah sembilan item pertanyaan di dalam penelitian ini valid atau telah mampu mengukur apa yang seharusnya di ukur, yakni variable kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan layak digunakan sebagai indikator dari variabel.

### Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26,0. Pengujian realibilitas dalam penelitian ini menunjukan hasil terhadap variable dalam penelitian ini pengukuran keandalan untuk masing-masing variabel bebas dan variabel terikat memenuhi persyaratan  $\alpha > 0.70$ . Maka , dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-masing variable adalah reliabel.

Tabel 10. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,907
Kuliatas Suber Daya Manusia	0,945
Sistem pengendalian Intern	0,873
Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah	0,796

*Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS*

Berdasarkan uji reliabilitas kuesioner pada tabel 4.10 angka Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,70 yaitu untuk instrument oenerapan stnadar akuntansi pemerintahan sebesar 0,907, untuk instrument kualitas sumber daya manusia sebesar 0,945, untuk instrumen system pengendalian intern sebesar 0,873 dan yang terakhir untuk instrument kualitas laporan keuangan pamerintah daerah sebesar 0,796. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS, maka dapat diketahui bahwapenerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, system pengendalian inter dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah reliable karena memiliki nilai di atas 0,70 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel – variabel penelitian memiliki reliabilitas atau ketepatan yang tinggi untuk dijadikan variabel (konstruk) pada suatu penelitian.

### Hasil Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan uji simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t) dengan menggunakan *software SPSS 26.0 for windows (Statistica Productand Service Solutions)*.

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumberlain yang terkumpul. Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara dua variabel atau lebih atau menganalisa pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) secara bersamaan (Ghozali, 2018). Hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

**Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.828	.396		2.090	.043
	Total X1	.306	.142	.316	2.151	.038
	Total X2	.134	.125	.154	1.070	.291
	Total X3	.383	.142	.421	2.691	.010

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 0,828 + 0,306X_1 + 0,134X_2 + 0,383X_3$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Komitmen Organisasi

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 0,828. Artinya jika variable penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern adalah nol maka nilai tingkat kualitas keuangan pemerintah daerah (Y) bernilai sebesar 0,828.
2. Koefisien regresi untuk variable penerapan standar akuntansi pemerintahan bernilai positif yakni sebesar 0,306 maka mengindikasikan bahwa setiap peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) bernilai sebesar 0,306.
3. Koefisien regresi untuk variable kualitas sumber daya manusia bernilai positif yaitu sebesar 0,134 maka mengindikasikan bahwa setiap peningkatan

kualitas sumber daya manusia sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) bernilai sebesar 0,134.

4. Koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian intern bernilai positif sebesar 0,383 maka mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian intern sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) bernilai sebesar 0,383.

## Hasil Pengujian Hipotesis

### Uji F

Tabel 12. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.794	3	1.265	26.748	.000 <sub>b</sub>
	Residual	1.891	40	0.047		
	Total	5.685	43			
a. Dependent Variable: Total Y						
b. Predictors: (Constant), Total X3, Total X1, Total X2						

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa Fhitung sebesar 26.748 dan angka taraf signifikansi jauh lebih  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) oleh karena itu  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

### Uji t

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengujian ini ditetapkan berdasarkan probabilitas. Apabila tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5 persen, dengan kata lain jika probabilitas  $H_a > 0,05$  maka dinyatakan tidak signifikan, dan jika probabilitas  $H_a < 0,05$  maka dinyatakan signifikan (Ghozali, 2018).

Tabel 13. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.828	.396		2.090	.043
	Total X1	.306	.142	.316	2.151	.038

Total X2	.134	.125	.154	1.070	.291
Total X3	.383	.142	.421	2.691	.010

a. Dependent Variable: Total Y

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut:

1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai  $t$  2,151 dan signifikansi  $0,38 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima, artinya terdapat hubungan linear antara pengaruh standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, angka tersebut membuktikan bahwa secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
2. Variable Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai  $t$  1,070 dan signifikansi  $0,291 > 0,05$ , maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Dengan demikian, angka tersebut membuktikan bahwa secara parsial variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
3. Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai  $t$  2,691 dan signifikansi  $0,10 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima, artinya terdapat hubungan linear antara system pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, angka tersebut membuktikan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (adjusted  $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol sampai satu ( $0 < R^2 < 1$ ). (Ghozali, 2018)

Tabel 14. Hasil Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 <sup>a</sup>	.667	.642	.21743

a. Predictors: (Constant), Total X3, Total X1, Total X2

b. Dependent Variable: Total Y

Perhitungan pada tabel 4.14 diketahui *adjusted R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,642. Hal ini berarti bahwa 64,2% kinerja pemerintah daerah

Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh variabel standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern sedangkan selebihnya 35,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti Sistem Informasi Manajemen (Meisy Hendri dan Erinos NR 2020), Pemanfaatan Teknologi Informasi, (Harry Apriansyah, Sri Rahayu, dan Misni Erawati 2020), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dhedy Triwardana (2017).

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengujian hipotesis pertama Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai  $t$  2,151 dan signifikansi  $0,38 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima, artinya terdapat hubungan linear antara pengaruh standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, angka tersebut membuktikan bahwa secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gumelar, Agum (2017), Hendri, Meisy dan Erinos NR (2020), dan Triwardana (2017) dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi digunakan akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan.

Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah yang telah dipahami dengan baik maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dengan baik dan benar. Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh, nilai rata - rata penerapan standar akuntansi pemerintahan dikategorikan baik dengan nilai 59,43%. Jika dilihat dari total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 4 yaitu menerapkan basis kas untuk pengakuan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran tingkat capaian responden 96%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual sangat berguna untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan

keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dengan demikian, melalui penerapan standar akuntansi yang baik ini akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat di pertanggungjawabkan serta di tingkatkan lebih baik lagi.

### **Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan keuangan**

Penyebab kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah karena kualitas sumber daya manusia pejabat penatusahaan keuangan daerah Kabupaten Bungo masih perlu di tingkatkan lagi oleh pemerintah daerah, dimana masih banyaknya bagian pengelola keuangan yang berlatar belakang bukan dari pendidikan akuntansi atau keuangan, sebanyak kurang lebih 32% orang yang bukan dari latar belakang pendidikan akuntansi keuangan dimana 12 orang sarjana S1 dan 3 orang SMA Sederajat dari data kuesioner yang ada, hal ini dapat mempengaruhi kurang optimal nya kinerja dalam mengelola keuangan daerah.

Pengujian hipotesis kedua Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki nilai  $t$  1,070 dan signifikasi  $0,291 > 0,05$ , maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Dengan demikian, angka tersebut membuktikan bahwa secara parsial variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julyana (2021) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Penyebab kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah karena kualitas sumber daya manusia pejabat penatusahaan keuangan daerah Kabupaten Bungo masih perlu di tingkatkan lagi oleh pemerintah daerah, dimana dilihat dari data responden, masih banyaknya bagian pengelola keuangan yang berlatar belakang bukan dari pendidikan akuntansi atau keuangan, hal ini dapat mempengaruhi kurang optimal nya kinerja dalam mengelola keuangan daerah.

Pemaparan tersebut didukung oleh (Shylvia,2016), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik dapat mengelola keuangan daerah dan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan dan hal ini dapat di lakukan dengan cara mengadakan diklat pengelolaan keuangan daerah dan sosialisasi atas peraturan yang berkaitan dengan keuangan daerah mengingat bagian keuangan tersebut sebagian besar bukan berlatar belakang bidang akuntansi, melainkan pendidikan beragam sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini bisa dapat mengatasi kelemahan yang terdapat pada ketidaksesuaian latar belakang pendidikan

pejabat pengelolaan keuangan daerah, karena semakin baik kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gumelar, Agum (2017) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Selain itu, dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pengujian hipotesis ketiga Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai  $t_{2,691}$  dan signifikansi  $0,10 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima, artinya terdapat hubungan linear antara system pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, angka tersebut membuktikan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faishol (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian lain yang mendukung yaitu Kiranayanti dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Nilam (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan negara.

Nilai rata-rata sistem pengendalian intern di kategorikan baik dengan nilai 70,93%. Jika dilihat dari nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 3 yaitu menerapkan penentuan batas dan penentu toleransi salah saji capaian responden 96%. Dengan demikian bila temuan salah saji lolos dari pengujian secara kuantitatif, artinya salah saji masih dibawah threshold, maka auditor perlu melakukan pengujian lagi dari sudut pandang kualitatif. Dalam tahap ini auditor perlu mengidentifikasi kepentingan atau concern dari pengguna laporan keuangan hasil auditannya.

Pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

#### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Pengujian hipotesis keempat dari uji Anova atau F test diperoleh hasil, yaitu bahwa Fhitung sebesar 26.748 dan angka taraf signifikansi jauh lebih  $<0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) oleh karena itu  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern secara bersama sama berpengaruh terhadap variable kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bungo sebesar 64,2% dipengaruhi oleh variabel standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia dan sistim pengendalian intern. Besarnya pengaruh ini masuk dalam kategori cukup kuat (41%-70%).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Gumelar, Agum (2017) yaitu bahwa kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas

sumber daya manusia, sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo serta Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al. Haryono Jusup. 2011. *Auditing*. edisi 2. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Andriani, S. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2(2), 44-55.
- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 44-62.
- Faishol, A. (2016). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Kualitas laporan keuangan (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 1(3)
- Ghozali. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*.
- Gumelar, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kerinci). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Hendri, M., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479-2493.
- Julyana, A. R. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Jember (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas

- Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 1290–1318.
- Latifah, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Bantul). Prodi Akuntansi.
- Sari, N., Hasan, A., & Diyanto, V. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Triwardana, D., Yusralaini, Y., & Susilatri, S. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar) (Doctoral dissertation, Riau University).